



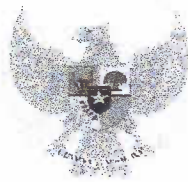
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



Rencana Kerja
RENJA
Tahun 2020

www.pu.bone.go.id

Jalan Laksamana Yos Sudarso - Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan
Telpn : (0481) 26907 - Email : pu@bone.go.id



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone tahun 2018 Nomor 91);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 31. Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor.31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.

- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 32

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 Renja Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap

indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 10 (Sepuluh) indikator kinerja utama, terdapat 8 (Delapan) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BONE**



H. ASKAR, S. ST, M.Si
Pangkat : Pembina, IV/a
Nip. 19681231 199803 1 042

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	61
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	63
3.3. Program dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	78
4.1. Rencana Kerja.....	78
BAB V PENUTUP	93

Daftar Tabel

Halaman

1. Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone s/d Tahun 2019.....	9
2. Tabel 2.1.2. Kondisi Jalan Tahun 2013-2018	30
3. Tabel 2.1.3. Kondisi Jembatan Tahun 2013-2018	31
4. Tabel 2.1.4. Daftar Realisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	35
5. Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018	40
6. Tabel 2.2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone Hingga Tahun 2019 (Triwulan 1) dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021	41
7. Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2020-DPU-PTR	47
8. Tabel 2.5.1. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	59
9. Tabel 2.5.2. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	60
10. Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	64
11. Tabel 3.3.1. Rekapitulasi Nama Program dan Kegiatan (Tahun 2019-2023)	65
12. Tabel 3.3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	68
13. Tabel 4.2.1. Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Bone	79

BAB I

1 *Pendahuluan*

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, merubah status kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. Sebelumnya Dinas PU-PTR bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air yang kemudian Bidang Sumber Daya Air berdiri sendiri menjadi satu OPD yaitu Dinas PSDA. Sedangkan Penataan Ruang sebelumnya menjadi Bidang Tata Ruang dan Permukiman yang saat ini berubah menjadi Dinas PKPP. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penggabungan antara penyelenggaraan Jalan dan Jembatan serta Penataan Ruang sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja maka berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dengan lahirnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi serta Penataan Ruang di Kabupaten Bone untuk menjadikan Bone lebih berdaya saing dan sejahtera.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, proses penyusunan Renstra OPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Renstra SKPD sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan jangka pendek

untuk satu Tahun Anggaran yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Awal Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019–2023, Skala Prioritas, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan efektifitas dan Efisiensi kegiatan SKPD. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 Pengelolaan Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Lembaga Pemerintah secara umum dan khususnya pada Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota untuk menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Jangka menengah atau RPJM serta suatu rencana-rencana strategis atau yang umum dikenal dengan RENSTRA (Rencana Strategis) lingkup SKPD dan RENJA Lingkup Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sebagai amanat dari Undang-Undang dimaksud di atas dan untuk melaksanakan dan menjabarkan visi misi Bupati Bone masa bakti tahun 2019 – 2023 maka Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone menyusun dokumen perencanaan berupa Dokumen Rencana Strategis/Renstra sebagai upaya penjabaran dan implementasi tindak lanjut dari sejumlah Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Tahun 2019 - 2023 sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bone.

Seiring waktu pasca pergeseran Paradigma Perencanaan Pembangunan yang menekankan pada suatu model pendekatan “ Mendengar dari Bawah/Masyarakat” atau lazimnya *Bottom Up* , Pendekatan Partisipatif dan demokratis serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, aspek politis yang dinamis dan tinjauan teknokrat Pemerintah.

Hal ini mengisyaratkan kepada seluruh *stakeholder* bahwa melalui model pendekatan tersebut diharapkan akan mewujudkan dan memenuhi suatu kaidah-kaidah perencanaan yang akan tersusun secara sistematis, transparan, akuntabel, konsisten dengan sejumlah rencana-rencana lainnya sehingga output dari tujuan akan mendapat legitimasi yang kuat dari legislatif, maupun seluruh pihak baik dalam pengambilan keputusan perencanaan maupun dalam implementasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur dan mendasari sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dan perencanaan, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi/Kelembagaan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang Peranan dan Tanggung Jawab Kepala SKPD Untuk menyiapkan Rencana Strategis SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD dijadikan Pedoman Bagi Penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).
20. Rancangan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun maksud penyusunan rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah sebagai suatu dokumen yang menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023.

B. Tujuan

Secara umum tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan sejumlah rencana-rencana tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bone.
- b. Sebagai Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sebagai instansi teknis/lembaga dalam mendukung pembangunan daerah.
- d. Sebagai dasar atau tolok ukur kebijakan dalam penyusunan standar pelayanan minimum dan bahan evaluasi akan perbaikan sejumlah capaian-capaian.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

BAB V : PENUTUP

Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

BAB II

2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai indikator kinerja urusan tersebut maka pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten telah tersusun Rencana Strategis (**RENSTRA**) 2019 – 2023 dan Review Renstra Tahun 2019 – 2023 Rencana Strategis yang disusun diharapkan mampu mewujudkan pencapaian RPJMD yang dimaksud pada misi ke-4 melalui Bidang yang ada pada struktur organisasi dan perubahannya. Tabel dibawah ini merupakan rekapitulasi program dan rencana anggaran yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 sd 2019.

Dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, maka capaian kerja sasaran strategis secara kuantitatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone tahun 2018 sd 2019, dapat di uraikan sebagai berikut.

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone s/d Tahun 2019

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/Kegiat an (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 sd 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d taun Berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	8.318.548.000	1.606.815.766	2.104.936.000	1.952.673.961	92,77	1.651.748.000	5.211.237.727	62,65
1	03	01	02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar	930.000.000	133.684.772	176.000.000	162.970.539	92,60	175.000.000	471.655.311	50,72
1	03	01	07	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	1.573.910.000	440.110.000	568.360.000	451.991.760	79,53	313.910.000	1.206.011.760	76,63
1	03	01	13	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	150.000.000	32.505.650	33.000.000	31.155.300	94,41	30.000.000	93.660.950	62,44
1	03	01	15	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan	700.000.000	129.990.000	181.400.000	181.390.000	99,99	140.000.000	451.380.000	64,48

					Perundang-Undangan	bahan bacaan (Kali)								
1	03	01	23	5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)	3.614.750.000	679.568.644	850.000.000	848.991.462	99,88	722.950.000	2.251.510.106	62,29
1	03	01	24	6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	1.349.888.000	190.956.700	296.176.000	276.174.900	93,25	269.888.000	737.019.600	54,60
1	03	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)	5.024.617.000	839.182.875	2.358.901.000	2.151.347.951	91,20	629.117.000	3.619.647.826	72,04
1	03	02	05	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Unit)	1.500.000.000	-	773.061.000	769.222.550	99,50	-	769.222.550	51,28
1	03	02	07	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Paket)	145.000.000	-	134.643.000	63.202.000	46,94	-	63.202.000	43,59
1	03	02	09	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Paket)	406.500.000	99.718.000	313.818.000	263.818.000	84,07	101.500.000	465.036.000	114,40
1	03	02	20	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)	200.000.000	223.777.000	265.000.000	252.675.000	95,35	-	476.452.000	238,23

1	03	02	22	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	885.000.000	286.821.500	210.704.000	198.954.000	94,42	200.000.000	685.775.500	77,49
1	03	02	24	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)	1.310.000.000	208.971.375	308.995.000	278.768.401	90,22	257.500.000	745.239.776	56,89
1	03	02	28	7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)	360.117.000	19.895.000	71.550.000	45.678.000	63,84	70.117.000	135.690.000	37,68
1	03	02	29	8	Pengadaan Moubeler	Jumlah Pengadaan Mobeler (Set)	218.000.000	-	213.130.000	211.030.000	99,01	-	211.030.000	96,80
1	03	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi masing-masing (%)	399.300.000	-	-	-	-	-	-	-
1	03	03	01	1.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah MesinK/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)	60.000.000	-	20.000.000	20.000.000	100,00	-	20.000.000	33,33
1	03	03	02	2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN yang diadakan (Pasang)	296.100.000	-	-	-	-	-	-	-
1	03	03	05	3.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus (Non Dinas) untuk ASN dan Tenaga Kontrak yang diadakan	43.200.000	-	48.000.000	48.000.000	100,00	-	48.000.000	111,11

						(Pasang)								
1	03	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, Keuangan dan Keterampilan khusu Bidang Ke Puan (%)	420.000.000	80.650.000	173.000.000	144.825.000	83,71	90.000.000	198.825.000	47,34
1	03	05	01	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal (Orang)	230.000.000	80.650.000	173.000.000	144.825.000	83,71	50.000.000	158.825.000	69,05
1	03	05	19	2	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Kegiatan)	190.000.000	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	21,05
1	03	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)	175.405.000	13.530.000	22.170.000	18.445.300	83,20	15.405.000	32.659.700	18,62
1	03	06	01	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	175.405.000	13.530.000	22.170.000	18.445.300	83,20	15.405.000	47.380.300	27,01
1	03	08			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang	870.930.000	-	-	-	-	160.930.000	160.930.000	18,48

						Pemerintahan Umum (%)								
1	03	08	01	1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)	408.430.000	-	-	-	-	88.430.000	88.430.000	21,65
1	03	08	03	2	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)	362.500.000	-	-	-	-	72.500.000	72.500.000	20,00
1	03	08	02	3	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
1	03	015			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten	302.500.000.000	40.249.332.200	80.663.113.000	80.469.335.400	99,76	32.500.000.000	153.218.667.600	50,65
						Persentase Pembangunan Jembatan	21.000.000.000	966.679.500	7.471.756.000	7.441.569.800	99,60	3.000.000.000	11.408.249.300	54,32
1	03	15	03	1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)	290.000.000.000	39.448.542.000	80.002.550.000	79.837.657.600	99,79	30.000.000.000	149.286.199.600	51,48
1	03	15	04	2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)	5.000.000.000	966.679.500	731.780.000	726.973.900	99,34	1.000.000.000	2.693.653.400	53,87
1	03	15	05	3	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)	16.000.000.000	12.931.069.946	6.739.976.000	6.714.595.900	99,62	2.000.000.000	21.645.665.846	135,29

1	03	15	07	4	Bulan Bakti Nasional	Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)	7.500.000.000	720.213.000	579.163.000	555.942.000	95,99	1.500.000.000	2.776.155.000	37,02
1	03	15	11	5	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)	5.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	20,00
1	03	18			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)	181.481.820.000	79.274.466.176	26.850.310.500	26.663.771.930	99,31	13.881.820.000	119.820.058.106	66,02
1	03	18	01	1	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)	2.500.000.000	1.252.694.500	1.495.707.000	1.485.678.000	99,33	500.000.000	3.238.372.500	129,53
1	03	18	03	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	154.033.200.000	61.258.982.750	25.347.911.000	25.178.093.930	99,33	10.033.200.000	96.470.276.680	62,63
1	03	18	06	3	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)	1.498.620.000	-	-	-	-	1.498.620.000	1.498.620.000	100,00
1	03	18	15	4	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	500.000.000	100,00
1	03	18	18	5	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin oleh 9 UPTD (Km)	22.950.000.000	-	-	-	-	1.350.000.000	1.350.000.000	5,88

1	03	20		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)	1.000.000.000	153.390.000	111.100.000	111.050.000	99,95	-	264.440.000	26,44
1	03	20	01	1.	Inspeksi Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang disurvei kondisi (Km)	600.000.000	102.920.000	-	-	-	-	102.920.000	17,15
1	03	20	02	2.	Inspeksi Kondisi Jembatan	Panjang Jembatan Kabupaten yang disurvei kondisi (M)	400.000.000	50.470.000	111.100.000	111.050.000	99,95	-	161.520.000	40,38
1	03	22		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan		Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)	2.410.000.000	207.239.086	71.570.000	68.586.700	95,83	-	275.825.786	11,45
1	03	22	01	1.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Panjang jalan berbasis SIG (Km)	500.000.000	-	71.570.000	68.586.700	95,83	-	68.586.700	13,72
1	03	22	02	2.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Jumlah Jembatan berbasis SIG (Unit)	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1	03	22	03	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan)	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-

1	03	22	05	4	Penyusunan Leger Jalan	Panjang jalan yang dilegalisasi (Km)	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1	03	22	06	5	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Jumlah aplikasi sistem informasi jalan dan jembatan (Aplikasi)	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1	03	23			Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	16.320.700.000	236.580.420	606.972.000	551.663.180	90,89	6.195.700.000	6.983.943.600	42,79
1	03	23	02	1	Pembangunan Gedung Workshop	Jumlah Gedung yang dibangun (Unit)	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1	03	23	03	2	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Gedung Laboratorium yang dibangun (Unit)	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1	03	23	04	3	Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat berat yang diadakan (Unit)	9.000.000.000	-	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	55,56
1	03	23	06	4	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang diadakan (Set)	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
1	03	23	08	5	Rehabilitasi/Peeliharaan Gedung Workshop	Jumlah Gedung workshop yang dipelihara (Unit)	600.000.000	-	220.062.000	213.162.000	96,86	-	213.162.000	35,53
1	03	23	11	6	Rehabilitasi/Peeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)	2.345.700.000	236.580.420	302.785.000	266.707.680	88,08	345.700.000	848.988.100	36,19

1	03	23	12	7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)	250.000.000	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000	60,00
1	03	23	14	8	Penataan Halaman Gedung Workshop	Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	100,00
1	03	23	15	9.	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan	Jumlah Data Base Fasilitas Penunjang Jalan (Dok)	200.000.000	-	84.125.000	71.793.500	85,34	200.000.000	271.793.500	135,90
1	03	23	16	10	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)	500.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	20,00
1	03	23	17	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan PJU Lampu Jalan	Jumlah PJU lampu jalan yang terpelihara oleh UPT (Titik)	2.025.000.000	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	9,88
1	03	30			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (%)	22.538.000.000	24.163.280.350	23.775.236.150	19.535.821.887	82,17	6.538.000.000	50.237.102.237	222,90
1	03	30	02	1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)	Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)	22.538.000.000	23.409.284.950	23.357.451.000	19.230.665.087	82,33	6.538.000.000	49.177.950.037	218,20

1	03	32		Program Pengaturan Jasa Konstruksi		Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa kosntruksi di Kabupaten Bone (%)	725.000.000	209.553.100	127.180.000	83.184.600	65,41	125.000.000	417.737.700	57,62
1	03	32	01	1	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi (Kegiatan)	625.000.000	209.553.100	127.180.000	83.184.600	65,41	125.000.000	417.737.700	66,84
1	03	32	02	2	Pengaturan dan Penyelenggaraa n Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi Ijin Jasa Konstruksi (Rekomendasi)	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)	4.847.150.000	810.059.401	2.112.350.000	1.140.868.200	54,01	927.150.000	2.878.077.601	59,38
1	05	15	03	1	Sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	648.575.000	-	-	-	-	128.575.000	128.575.000	19,82
1	05	15	06	2.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan (Dokumen)	2.000.000.000	154.839.801	173.975.000	148.042.600	85,09	-	302.882.401	15,14
1	05	15	07	3.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah master plan untuk kawasan industri (Dokumen)	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-

1	05	15	10	4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)	Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	498.575.000	-	-	-	-	98.575.000	98.575.000	19,77
1	05	15	11	5	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupten Bone yang akan direvisi (Dokumen)	700.000.000	175.014.800	500.000.000	194.146.000	38,83	700.000.000	1.069.160.800	152,74
1	05	16			Program Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang (%)	1.300.000.000	24.690.000	131.670.500	100.452.300	76,29	260.000.000	385.142.300	29,63
1	05	16	01	1.	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi kelayakan pemanfaatan ruang (Kegiatan)	125.000.000	24.690.000	131.670.500	100.452.300	76,29	25.000.000	150.142.300	120,11
1	05	16	10	2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang terbangun (Ha)	1.000.000.000	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	20,00
1	05	16	11	3	Survey kelayakan lokasi	Jumlah Pelaksanaan survey terhadap pengajuan rekomendasi perizinan (Kegiatan)	175.000.000	-	-	-	-	35.000.000		
1	05	17			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)	250.000.000	44.070.000	50.000.000	43.500.000	87,00	50.000.000	137.570.000	55,03

1	05	17	05	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaporan pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan (Dokumen)	250.000.000	44.070.000	50.000.000	43.500.000	87,00	50.000.000	35.000.000	20,00
---	----	----	----	---	------------------------------	---	-------------	------------	------------	------------	-------	------------	------------	-------

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.318.548.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.606.815.766. Pada tahun 2018 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.104.936.000 dengan realisasi anggaran RP. 1.952.673.961 atau 92,77%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.651.748.000. Pada program ini terdiri 6 Kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 930.000.000,- untuk 5 tahun kedepan. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 133.684.772. Pada tahun 2018 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar 176.000.000 dengan realisasi anggaran RP. 162.970.539 atau 92,60%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.000.000.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Ini Merupakan pendukung dalam rangka penataan administrasi umum dan keuangan untuk mencapai tertib pelaporan tepat waktu. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1.573.910.000,- untuk 5 tahun kedepan. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 440.110.000. Pada tahun 2018 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar 568.360.000 dengan realisasi anggaran RP. 451.991.760 atau 79,53%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 313.910.000.

c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini merupakan pendukung dalam rangka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor meliputi Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih. Alokasi Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- untuk 5 tahun kedepan. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 32.505.650. Pada tahun 2018 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar 33.000.000 dengan realisasi anggaran RP. 31.155.300 atau

94,41%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu peningkatan wawasan aparatur khususnya dalam Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta penataan ruang. Termasuk juga terhadap kontrol sosial oleh masyarakat melalui media cetak dan media online, kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.700.000.000,- untuk 5 tahun kedepan. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 129.990.000. Pada tahun 2018 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar 181.400.000 dengan realisasi anggaran RP. 181.390.000 atau 99,99%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000.

e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu melakukan rapat koordianasi dalam daerah ataupun luar daerah Kabupaten Bone. Alokasi Anggaran Rp. 3.614.750.000 untuk 5 tahun kedepan. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 679.568.644. Pada tahun 2018 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar 850.000.000 dengan realisasi anggaran RP. 848.991.462 atau 99,88%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 722.950.000.

f. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PU - PTR Kab.Bone dialokasikan dana sebesar Rp.1.349.888.000 untuk 5 tahun kedepan. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 190.956.700. Pada tahun 2018 Kegiatan Pelasanaan Administrasi Perkontaran dengan alokasi anggaran sebesar 296.176.000 dengan realisasi anggaran RP. 276.174.900 atau 93,25%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 269.888.000.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 5.024.617.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 839.182.875. Pada tahun 2018 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.358.901.000 dengan realisasi anggaran RP. 2.151.347.951 atau 91,20%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 629.117.000. Pada program ini terdiri 8 Kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan ini diperuntukkan untuk mendukung operasional dan mobile aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran Rp.1.500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini tidak dianggarkan. Pada tahun 2018 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 773.061.000 dengan realisasi anggaran Rp. 769.222.550 atau 99, 5%. Sedangkan untuk tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 145.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini tidak dianggarkan. Pada tahun 2018 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134.643.000 dengan realisasi anggaran Rp. 63.202.000 atau 46,94%. Sedangkan untuk tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung sarana dan prasarana perkantoran dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alokasi Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 406.500.000 untuk 5 tahun kedepan. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.718.000. Pada tahun 2018 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar 313.818.000 dengan realisasi anggaran RP. 263.818.000 atau 84,07%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.500.000.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi

anggaran sebesar Rp. 223.777.000. Pada tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 265.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 252.675.000 atau 95,35%. Sedangkan untuk tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara gedung kantor agar dipertahankan kondisi bangunan agar tetap terjaga pemanfaatan gedung dengan maksimal. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 885.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 286.821.500. Pada tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Ruti/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar 210.704.000 dengan realisasi anggaran RP. 198.954.000 atau 94,42%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung operasional dan mobile aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.310.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 208.971.375. Pada tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Ruti/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar 308.995.000 dengan realisasi anggaran RP. 278.768.401 atau 90,22%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 257.500.000. Pembiayaan kegiatan ini meliputi Biaya jasa service kendaraan, Penggantian suku cadang, Bahan Bakar, Biaya surat nomor kendaraan

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini diperuntukkan untuk memelihara peralatan gedung kantor agar tetap berfungsi dengan baik. Alokasi Anggaran Rp. 360.117.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.895.000. Pada tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Ruti/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.550.000 dengan realisasi anggaran Rp. 45.678.000 atau 63,84%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.117.000. Kegiatan ini meliputi

pembiayaan perbaikan/Pemeliharaan AC Split, perbaikan printer dan komputer.

h. Pengadaan Meobeler

Kegiatan ini diperuntukkan untuk Pengadaan Moebeler Alokasi Anggaran Rp. 218.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini tidak dianggarkan. Pada tahun 2018 Kegiatan Pengadaan Moubeler dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.130.000 dengan realisasi anggaran Rp. 211.030.000 atau 99,01%. Sedangkan untuk tahun 2019 Kegiatan ini tidak dianggarkan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 399.300.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan. Pada program kegiatan ini terdiri dari 3 kegiatan.

a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 60.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 Kegiatan ini tidak dianggarkan . Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000 atau 100%. Sedangkan untuk tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 296.100.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 43.200.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini tidak dianggarkan. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000 atau 100%, sedangkan untuk tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 420.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran

sebesar Rp. 80.650.000. Pada tahun 2018 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 144.825.000 atau 83,71%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000. Pada program ini terdiri dari 2 kegiatan.

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 230.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 80.650.000. Pada tahun 2018 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 144.825.000 atau 83,71%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.

b. Bimbingan Teknis.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 190.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 175.405.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 13.530.000. Pada tahun 2018 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.170.000 dengan realisasi anggaran Rp. 18.445.300 atau 83,20%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.405.000. Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 175.405.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 13.530.000. Pada tahun 2018 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.170.000 dengan realisasi anggaran Rp. 18.445.300 atau 83,20%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.405.000.

6. Program Penunjang Pemerintahan Umum.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 870.930.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 tidak dianggarkan. Pada tahun 2018 Program Penunjang Pemerintahan Umum tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.930.000. Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan.

a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 408.430.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.430.000.

b. Promosi dan Pameran Pembangunan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 362.500.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2018 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.500.000.

c. Pengelolaan Website Perangkat.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2018 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 323.500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.216.011.700. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.134.869.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.910.905.200 atau 99,75%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.500.000.000. Pada program ini terdiri dari 5 kegiatan.

- Pembangunan Jalan Kabupaten.

a. Pembangunan Jalan .

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 290.000.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 39.448.542.000. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.002.550.000 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 79.837.657.600 atau 99,79%, sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000.

b. Bulan Bakti Nasional

Kegiatan ini sebagai wujud kerja sama dengan TNI dalam membantu menyiapkan pelaksanaan Infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan. Kegiatan bulan bakti Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 720.213.000. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 579.163.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 555.942.000 atau 95,99%, sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000. Realisasi anggaran meliputi Biaya Perencanaan, biaya fisik, biaya honorarium dan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.

c. Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan, sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.

- Pembangunan Jembatan.

d. Perencanaan Pembangunan Jembatan .

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 5.000.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 966.679.500. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 731.780.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 726.973.900 atau 99,34%, sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.

e. Pembangunan Jembatan .

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 16.000.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 12.931.069.946. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.739.976.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.714.595.900 atau 99,62%, sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000.

8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 181.481.820.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.274.466.176. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.850.310.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.663.771.930 atau 99,31%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.881.820.000. Pada program ini terdiri dari 5 kegiatan.

a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 2.500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.252.694.500. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.495.707.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.485.678.000 atau 99,33%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000.

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 154.033.200.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.258.982.750. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.347.911.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.178.093.930 atau 99,33%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.033.200.000.

c. Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 1.498.620.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.498.620.000.

d. Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000.

e. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 22.950.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan

tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000.

9. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.390.000. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.100.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 111.050.000 atau 99,95%. Sedangkan untuk tahun 2019 tidak dianggarkan. Pada program ini terdiri dari 2 kegiatan.

a. Inspeksi Kondisi Jalan

Kegiatan ini mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam pemutahiran kondisi jalan setiap tahun. Alokasi anggaran Rp. 600.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan. Kegiatan ini membiayai survey pengukuran yang dilakukan oleh pihak ke 3 dengan tenaga ahlinya, perjalanan dinas, honorarium, ATK dalam pelaksanaan inspeksi jalan.

Tahun 2018 telah disurvey kondisi jalan sebanyak 356 Ruas dengan total panjang jalan 2483,30 Km. Gambaran tentang kondisi jalan Tahun 2013 - 2017 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2. Kondisi Jalan Tahun 2013 - 2018

TAHUN	BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	MANTAP
TAHUN 2013	36,67	14,64	17,95	30,75	51,31
TAHUN 2014	40,87	17,51	23,90	17,72	58,38
TAHUN 2015	41,04	16,42	22,55	19,99	57,46
TAHUN 2016	43,21	18,47	23,34	14,98	61,68
TAHUN 2017	45.24	26.01	15.24	13.51	71.25
TAHUN 2018	44,01	15,18	17,18	23,63	59,18

Sumber : Data Kondisi Jalan & Jembatan 2018

b. Inspeksi Kondisi Jembatan

Kegiatan ini bertujuan melakukan inspeksi atau survey pada kondisi jembatan setiap tahun. Survey kondisi jembatan menggunakan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggara kegiatan ini

sebesar Rp. 50.470.000. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.100.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 111.050.000 atau 99,95%, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan. Kegiatan ini membiayai Survey kondisi jembatan yang dilakukan oleh tenaga ahli konsultan, honorarium pelaksana, ATK, Administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini. Tabel dibawah ini menggambarkan kondisi jembatan dari tahun ke tahun yang ada di Kabupaten Bone.

Tabel. 2.1.3. Kondisi Jembatan tahun 2013 – 2018

TAHUN	BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	MANTAP
TAHUN 2013	74,97	3,45	9,40	12,18	78,42
TAHUN 2014	76,10	3,50	9,46	10,90	79,60
TAHUN 2015	79,13	10,96	5,58	4,33	90,09
TAHUN 2016	77,97	8,21	4,20	9,62	86,18
TAHUN 2017	78.25	9.97	3.15	8.63	88.22
TAHUN 2018	79,25	10,09	3,01	7,65	89,34

Sumber : Data Kondisi Jalan & Jembatan

10. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 2.410.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.239.086. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.570.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.586.700 atau 95,83%. Sedangkan untuk tahun 2019 tidak dianggarkan. Pada program ini terdiri dari 5 kegiatan.

a. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 tidak dianggarkan. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.570.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.586.700 atau 95,83%. Sedangkan untuk tahun 2019 tidak dianggarkan.

b. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 800.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan

d. Penyusunan Leger Jalan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 800.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

e. Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 160.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.320.700.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 236.580.420. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 606.972.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 551.663.180 atau 90,89%. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 6.195.700.000. Pada program ini terdiri dari 11 kegiatan.

Kegiatan ini membiayai upah kerja operator alat berat, Penggantian suku cadang, bahan bakar, ATK, Biaya STNK, sevice, perjalanan dinas dan administrasi. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Gedung Workshop.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

b. Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

c. Pengadaan Alat-Alat Berat.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000.

d. Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini tidak dianggarkan, tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.062.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.162.000 atau 96,86%, dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

f. Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.345.700.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 236.580.420, tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 302.785.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 266.707.680 atau 88,08%, dan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 345.700.000.

g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan, sedangkan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000.

h. Penataan Halaman Gedung Workshop.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000.

i. Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 Kegiatan ini tidak dianggarkan. Tahun 2018 kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.125.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

71.793.500 atau 85,34%, sedangkan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000.

j. Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan, sedangkan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.

k. Rehabilitasi/Pemeliharaan PJU Lampu Jalan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.025.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan, sedangkan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000.

12. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.538.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 24.163.280.350. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.775.236.150 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.535.821.887 atau 82,17%. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 6.538.000.000. Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur).

Kegiatan ini adalah menyediakan fisik infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan. Tahun 2018 penganggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.357.451.000 realisasi anggar Rp. 19.230.665.087 atau 82.33% progress fisik 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.126.785.913 Kegiatan ini merealisasikan 30 Paket sebagaimana daftar tabel terlampir pada Tabel 2.4. Kegiatan ini membiyai fisik baik perencanaan dan pengawasan

Tabel 2.1.4. Daftar Realisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

NO	Uraian Kegiatan	Volume (M)	Lokasi Kecamatan	Nilai DPA/DPPA (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	- Pekerjaan Rabat Beton Jalan Desa Mario	375	Kec. Mare	586,000,000	562,480,000
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Sumaling	450	Kec. Mare		
2	- Pekerjaan Rabat Beton Desa Batu Gading	483	Kec. Mare	392,500,000	370,551,000
3	- Pekerjaan Paving Blok Desa Bulu-Bulu	237	Kec. Tonra	494,000,000	486,249,000
	- Pekerjaan Rabat Beton Desa Padatuo	305	Kec. Tonra		
4	- Pekerjaan Pasangan Batu Desa Sama Enre	805	Kec. Tonra	494,000,000	492,350,000
	- Pekerjaan Rabat Beton Jalan Desa Bicoing	308	Kec. Tonra		
5	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Abbumpungeng-Pationgi	210	Kec. Cina	392,000,000	390,601,000
	- Perkerasan Jalan Desa Cinennung Dsn Pationgi	204	Kec. Cina		
	- Pekerjaan Pasangan Batu Desa Samaenre	577	Kec. Cina		
	- Pekerjaan Pasangan Batu Desa Lompu Dsn Cippo	558	Kec. Cina		
6	- Pekerjaan Rabat Beton Desa Talungeng	228.3	Kec. Barebbo	295,000,000	292,818,000
	- Pekerjaan Paving Blok Dusun Tabu Kel. Waetuo	149.4	Kec. TR Timur		
7	- Pekerjaan Rabat Beton Desa Waepubbu	300	Kec. Amali	490,000,000	435,943,000
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Bila	228	Kec. Amali		
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Laponrong	177	Kec. Amali		
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Ulaweng Riaja	250	Kec. Amali		
8	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Benteng Tellue	343	Kec. Amali	392,000,000	350,719,000
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa waeputtange	128	Kec. Amali		
9	- Pekerjaan Paving Blok Lingkungan Pao Kel Bajoe	898.7	Kec.T.R. Timur	395,000,000	393,396,000
10	- Pekerjaan Paving Blok Ling Appasareng Kel Bajoe	271.5	Kec.T.R. Timur	590,000,000	588,900,000
	- Pekerjaan Paving Blok Lingungan Doajeng Kel Lonrae	261.3	Kec.T.R. Timur		
11	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Lingkungan Salekoe Kelurahan TA	617	Kec. T. Riattang	295,000,000	293,513,000
12	- Pekerjaan Paving Blok Lingk. Bubung Tello kel. Manurunge	233.3	Kec. T. Riattang	294,000,000	290,863,000
	- Pekerjaan Pengerasan Jalan Lingk. Pallengoreng Kel. Biru	124	Kec. T. Riattang		
	- Pekerjaan Paving Blok Lingk.	121	Kec. T.		

	Malajena Kel Welanae		Riattang		
13	- Pekerjaan Paving Blok Jalan Ling. Waru Kel. Bulu Tempe	158.5	Kec. TR Barat	343,500,000	338,104,000
	- Pekerjaan Paving Blok ling Coppoleang Kel. Macanang	110.5	Kec. TR Barat		
	- Pekerjaan Paving Blok Lr. II Jalan Hos. Cokroaminoto	92.6	Kec. TR Barat		
14	- Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Tawaroe	81.6	Kec. Dua Boccoe	590,000,000	587,343,000
	- Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Sanrange	268.4	Kec. Dua Boccoe		
	- Pekerjaan Paving Blok Desa Uloe	141	Kec. Dua Boccoe		
	- Pekerjaan Paving Blok Desa Pakkasalo	170.1	Kec. Dua Boccoe		
15	- Pekerjaan Paving Blok Desa Mario	188.9	Kec. Dua Boccoe	392,000,000	390,939,000
	- Pekerjaan Paving Blok Dsn. Use'e Desa Lebonge	82	Kec. Cenrana		
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Dsn. Lebonge Desa Lebonge	195	Kec. Cenrana		
16	- Pekerjaan Perkerasan jalan Desa Cakkeware	900	Kec. Cenrana	392,500,000	391,515,000
17	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Padaidi	187.2	Kec. T. Siattinge	392,000,000	389,607,000
	- Pekerjaan Paving Blok Desa Lamuru	119.2	Kec. T. Siattinge		
	- Pekerjaan Paving Blok Kel. Pompanua	107	Kec. Ajangale		
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Welado	322	Kec. Ajangale		
18	- Pekerjaan Rabat Beton Kel. Otting	63	Kec. T. Siattinge	392,000,000	391,254,000
	- Pekerjaan Paving Blok Desa Mattoanging	189.6	Kec. T. Siattinge		
19	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Samaenre	291	Kec. Bengo	293,000,000	291,555,000
	- Pekerjaan Rabat Beton Desa Walimpong	150	Kec. Bengo		
20	- Pekerjaan Perkerasan Desa Pallawa	483	Kec. Tellu Limpoe	491,000,000	484,921,000
	- Pekerjaan Rabat jalan lingk SMP /SMA Di Tujue Desa Gaya Baru	208	Kec. Tellu Limpoe		
	- Pekerjaan Pasangan Batu Desa Lagori	141	Kec. Tellu Limpoe		
	-Pekerjaan Rabat Beton Ds Tompong Desa Patuku Limpoe	114	Kec Lappariaja		
21	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Tadang Palie	389	Kec. Ulaweng	295,000,000	294,018,000
22	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Baringeng	771	Kec. Libureng	392,500,000	391,742,000
23	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Mattirowalie	51	Kec. Libureng	343,000,000	312,879,000
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Polewali	175	Kec. Libureng		
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Pitumpidange	225	Kec. Libureng		
24	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Dsn Galung Lampe Desa Batu Lappa	504	Kec. Patimpeng	589,000,000	587,877,000
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Patimpeng	246	Kec. Patimpeng		

25	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Tompong Patu	156	Kec. Kahu	541,000,000	484,858,000
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Palakka	148	Kec. Kahu		
	- Pekerjaan Pasangan Batu Ruas Pammusureng - Bana	181	Kec. Bontocani		
	- Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa Lalepo	141	Kec. Kahu		
26	- Pekerjaan Paving Blok Desa Sailong	76.7	Kec. Dua Boccoe	294,000,000	278,373,000
	- Pekerjaan Paving Blok Desa Ujung	98.1	Kec. Dua Boccoe		
	- Pekerjaan Paving Blok Desa Pattiro	88.3	Kec. Dua Boccoe		
27	- Pekerjaan Drainase Desa Watu (Depan Mesjid)	220.2	Kec. T. Riattang	100,000,000	99,560,000
28	- Pekerjaan Paving Blok Lingkungan Baru Kel. Masumpu	95.7	Kec. T. Riattang	100,000,000	99,513,000
29	- Pekerjaan Talud Desa Ujung'E	199	Kec. Tonra	100,000,000	99,557,000
30	- Pekerjaan Rabat Beton Desa Bainang	125.7	Kec. Palakka	100,000,000	99,523,000
	Jumlah	17,496.8		11,250,000,000	10,961,521,000

13. Program Pengaturan Jasa Konstruksi.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 725.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 209.553.100. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.180.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.184.600 atau 65,41%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000. Pada program ini terdiri dari 2 kegiatan.

a. Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan.

Program ini dengan alokasi anggaran Rp. 625.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 kegiatan ini dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 209.553.100. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.180.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.184.600 atau 65,41%. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000.

b. Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 kegiatan ini belum dianggarkan.

14. Program Perencanaan Tata Ruang.

Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.847.150.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 810.059.401. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.112.350.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.140.868.200 atau 54,01%. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 927.150.000. Pada program ini terdiri dari 5 kegiatan.

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 648.575.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, dan tahun 2018 Kegiatan ini tidak dianggarkan, dan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.575.000.

b. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 154.839.801 . Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.975.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.042.600 atau 85,09%, sedangkan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, tahun 2018 , dan tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

d. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD).

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 498.575.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2018 sd tahun 2023. Pada tahun 2017, dan tahun 2018 Kegiatan ini tidak dianggarkan, dan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.575.000.

e. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 175.014.800 . Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.146.000 atau 38,83%, sedangkan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000.

15. Program Pemanfaatan Ruang.

Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 24.690.000. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.670.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.452.300 atau 76,29%. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 260.000.000. Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan.

a. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 24.690.000, dan tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.670.500 dengan realisi anggaran sebesar Rp. 100.452.300 atay 76,29 %, Sedangkan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000.

b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000.

c. Survey Kelayakan Lokasi.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 dan taun 2018 kegiatan ini tidak dianggarkan, Sedangkan tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000.

16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 44.070.000. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.500.000 atau 87,00%. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000. Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019 sd tahun 2023. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp. 44.070.000. Pada tahun 2018 dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.500.000 atau 87,00%. Sedangkan untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Visi Misi Bupati khususnya pada frase visi sejahtera. Dalam rumusan misi yang telah disusun Bupati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian misi khususnya pada misi keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan. Kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan serta Penataan Ruang yang aman dan berkualitas di Kabupaten Bone.

Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	%	<u>Penjelasan Target</u> : <u>Sumber Data</u> :
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten- Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	<u>Formulasi Penghitungan</u> : <u>Sumber Data</u> :
Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Persentase kesesuaian Tata Ruang- Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan	%	<u>Formulasi Penghitungan</u> : <u>Sumber Data</u> :

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone hingga Tahun 2019 (Triwulan 1) untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2013-2018, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bone hingga Tahun 2019 (Triwulan 1) dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			100	100	100	100	92,77	62,65	100	100	
2	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)			100	100	100	100	91,20	72,04	100	100	
3	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi masing-masing (%)			100	100	100	100	-	-	100	100	

4	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, Keuangan dan Keterampilan khusus Bidang Ke Puan (%)			100	100	100	100	83,71	47,34	100	100	
5	Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)			100	100	100	100	83,20	18,62	100	100	
6	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)			100	100	100	100	-	18,48	100	100	
7	Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten			100	100	100	100	99,76	50,65	100	100	
8	Persentase Pembangunan Jembatan			100	100	100	100	99,60	54,32	100	100	

9	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)			100	100	100	100	99,31	66,02	100	100	
10	Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvey kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)			100	100	100	100	99,95	26,44	100	100	
11	Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)			100	100	100	100	95,83	11,45	100	100	
12	Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)			100	100	100	100	90,89	42,79	100	100	
13	Persentase Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (%)			100	100	100	100	82,17	222,90	100	100	

14	Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa kosntruksi di Kabupaten Bone (%)			100	100	100	100	65,41	57,62	100	100	
15	Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang			100	100	100	100	54,01	59,38	100	100	
16	Persentase pemanfaatan ruang 100%			100	100	100	100	76,29	29,63	100	100	
17	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)			100	100	100	100	87,00	55,03	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Penting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerusakan pada jaringan jalan kabupaten/kota maupun jalan-jalan pedesaan cukup tinggi.
2. Belum optimalnya aksesibilitas dan mobilitas pada daerah terpencil dan daerah perbatasan.
3. Belum efektifnya data base jalan/jembatan dalam rangka pembagian kewenangan penanganan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Kebinamargaan, serta belum tersedianya tenaga mekanik yang berkompeten dalam menangani alat-alat berat.
5. Pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang belum optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam

proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2019 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2020 – DPU –PTR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.651.748.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.662.950.000	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar	276	175.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar	276	185.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	672	313.910.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	672	315.000.000	
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	12	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	12	30.000.000	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	1104	140.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	1140	140.000.000	

5.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)	800	722.950.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)	800	722.950.000	
6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	60	269.888.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	60	270.000.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)	100	629.117.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)	100	2.473.000.000	
1	Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Unit)	-	-	Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Unit)	14	1.500.000.000	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Paket)	-	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Paket)	3	20.000.000	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Paket)	5	101.500.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Paket)	5	105.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)	1	100.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	5	200.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	5	200.000.000	

6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)	60	257.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)	60	257.500.000	
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)	18	70.117.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)	21	72.500.000	
8	Pengadaan Moubeler	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pengadaan Mobeler (Set)	-	-	Pengadaan Moubeler	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pengadaan Mobeler (Set)	5	218.000.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Tanete Riattang Timur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi masing-masing (%)	100	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Tanete Riattang Timur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi masing-masing (%)	100	199.650.000	
1.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah MesinK/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)	-	-	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah MesinK/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)	2	30.000.000	
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN yang diadakan (Pasang)	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN yang diadakan (Pasang)	65	148.050.000	
3.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pakaian Khusus (Non Dinas) untuk ASN dan Tenaga Kontrak yang diadakan (Pasang)	-	-	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pakaian Khusus (Non Dinas) untuk ASN dan Tenaga Kontrak yang diadakan (Pasang)	120	21.600.000	

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, Keuangan dan Keterampilan khusus Bidang Ke Puan (%)	46	90.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, Keuangan dan Keterampilan khusus Bidang Ke Puan (%)	100	150.000.000	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal (Orang)	2	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal (Orang)	3	100.000.000	
2	Bimbingan Teknis	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Kegiatan)	14	40.000.000	Bimbingan Teknis	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Kegiatan)	27	50.000.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	15.405.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	40.000.000	
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	3	15.405.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	3	40.000.000	
6	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	160.930.000	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kec. Tanete Riattang Timur	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	167.500.000	
1.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)	6	88.430.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)	5	70.000.000	

2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)	-	-	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)	1	25.000.000	
3	Promosi dan Pameran Pembangunan	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)	2	72.500.000	Promosi dan Pameran Pembangunan	Kec. Tanete Riattang Timur	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)	2	72.500.000	
7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten	26,17	32.500.000.000	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten	28,09	52.500.000.000	
			Persentase Pembangunan Jembatan	31,83	3.000.000.000			Persentase Pembangunan Jembatan	32,45	4.000.000.000	
1	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)	15	30.000.000.000	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)	25	50.000.000.000	
2	Perencanaan Pembangunan Jembatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)	3	1.000.000.000	Perencanaan Pembangunan Jembatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)	3	1.000.000.000	
3	Pembangunan Jembatan		Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)	35	2.000.000.000	Pembangunan Jembatan		Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)	30	3.000.000.000	
4.	Bulan Bakti Nasional		Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)	1	1.500.000.000	Bulan Bakti Nasional		Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)	1	1.500.000.000	

5.	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan		Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)	10	1.000.000.000	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan		Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)	10	1.000.000.000	
8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)	62,95	13.881.820.000	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)	71,16	41.900.000.000	
1	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)	5	500.000.000	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)	5	500.000.000	
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	5,574	10.033.200.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	15	36.000.000.000	
3	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I		Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)	40	1.498.620.000	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I		Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)	0	0	
4	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X		Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)	100	500.000.000	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X		Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)	0	0	
5	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin oleh 9 UPTD (Km)	27	1.350.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin oleh 9 UPTD (Km)	108	5.400.000.000	
9	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvey kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)	100	-	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvey kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)	100	250.000.000	

1.	Inspeksi Kondisi Jalan		Panjang Jalan Kabupaten yang disurvei kondisi (Km)	1559,514	-	Inspeksi Kondisi Jalan		Panjang Jalan Kabupaten yang disurvei kondisi (Km)	1559,514	150.000.000	
2.	Inspeksi Kondisi Jembatan		Panjang Jembatan Kabupaten yang disurvei kondisi (M)	4836,9	-	Inspeksi Kondisi Jembatan		Panjang Jembatan Kabupaten yang disurvei kondisi (M)	4836,9	100.000.000	
10	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan		Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)	-	-	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan		Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)	-	440.000.000	
1.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan		Panjang jalan berbasis SIG (Km)	-	-	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan		Panjang jalan berbasis SIG (Km)	-	-	
2.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan		Jumlah Jembatan berbasis SIG (Unit)	-	-	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan		Jumlah Jembatan berbasis SIG (Unit)	-	-	
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan)	-	-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan)	12	200.000.000	
4	Penyusunan Leger Jalan		Panjang jalan yang dilegalisasi (Km)	-	-	Penyusunan Leger Jalan		Panjang jalan yang dilegalisasi (Km)	1	200.000.000	
5	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan		Jumlah aplikasi sistem informasi jalan dan jembatan (Aplikasi)	-	-	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan		Jumlah aplikasi sistem informasi jalan dan jembatan (Aplikasi)	1	40.000.000	
11	Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	90	6.195.700.000	Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	100	3.175.000.000	

1	Pembangunan Gedung Workshop		Jumlah Gedung yang dibangun (Unit)	-	-	Pembangunan Gedung Workshop		Jumlah Gedung yang dibangun (Unit)	-	-	
2	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan		Jumlah Gedung Laboratorium yang dibangun (Unit)	-	-	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan		Jumlah Gedung Laboratorium yang dibangun (Unit)	1	500.000.000	
3	Pengadaan Alat-Alat Berat		Jumlah Alat berat yang diadakan (Unit)	3	5.000.000.000	Pengadaan Alat-Alat Berat		Jumlah Alat berat yang diadakan (Unit)	1	1.500.000.000	
4	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan		Jumlah alat laboratorium yang diadakan (Set)	-	-	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan		Jumlah alat laboratorium yang diadakan (Set)	1	200.000.000	
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop		Jumlah Gedung workshop yang dipelihara (Unit)	-	-	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop		Jumlah Gedung workshop yang dipelihara (Unit)	-	-	
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat		Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)	12	345.700.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat		Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)	12	500.000.000	
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan		Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)	1	150.000.000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan		Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)	-	-	
8	Penataan Halaman Gedung Workshop		Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)	1	200.000.000	Penataan Halaman Gedung Workshop		Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)	-	-	
9.	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan		JUmlah Data Base Fasilitas Penunjang Jalan (Dok)	1	200.000.000	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan		JUmlah Data Base Fasilitas Penunjang Jalan (Dok)	-	-	

10	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)	1	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)	1	100.000.000	
11	Rehabiltiasi/Pemeliharaan PJU Lampu Jalan		Jumlah PJU lampu jalan yang terpelihara oleh UPT (Titik)	40	200.000.000	Rehabiltiasi/Pemeliharaan PJU Lampu Jalan		Jumlah PJU lampu jalan yang terpelihara oleh UPT (Titik)	75	375.000.000	
12	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Persentase Pembangunan Infrasturktur Jalan Desa (%)	49,87	6.538.000.000	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Persentase Pembangunan Infrasturktur Jalan Desa (%)	50,95	4.000.000.000	
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)		Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)	10	6.538.000.000	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)		Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)	10	4.000.000.000	
13	Program Pengaturan Jasa Konstruksi		Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa kosntruksi di Kabupaten Bone (%)	100	125.000.000	Program Pengaturan Jasa Konstruksi		Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa kosntruksi di Kabupaten Bone (%)	100	150.000.000	
1.	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi (Kegiatan)	2	125.000.000	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi (Kegiatan)	2	125.000.000	
2.	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi		Jumlah Rekomendasi Ijin Jasa Konstruksi (Rekomendasi)	100	-	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi		Jumlah Rekomendasi Ijin Jasa Konstruksi (Rekomendasi)	100	25.000.000	
14	Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)	100	927.150.000	Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)	100	1.230.000.000	

1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang		Jumlah Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	3	128.575.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang		Jumlah Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	3	130.000.000	
2.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan		Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan (Dokumen)	2	-	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan		Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan (Dokumen)	1	500.000.000	
3.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan		Jumlah master plan untuk kawasan industri (Dokumen)	-	-	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan		Jumlah master plan untuk kawasan industri (Dokumen)	1	500.000.000	
4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)		Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	4	98.575.000	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)		Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	4	100.000.000	
5	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah		Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupten Bone yang akan direvisi (Dokumen)	1	700.000.000	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah		Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupten Bone yang akan direvisi (Dokumen)	-	-	
15	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase pemanfaatan ruang (%)	1	260.000.000	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase pemanfaatan ruang (%)	1	260.000.000	
1.	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang		Jumlah rekomendasi kelayakan pemanfaatan ruang (Kegiatan)	1	25.000.000	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang		Jumlah rekomendasi kelayakan pemanfaatan ruang (Kegiatan)	1	25.000.000	
2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau		Luas RTH yang terbangun (Ha)	10	200.000.000	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau		Luas RTH yang terbangun (Ha)	10	200.000.000	
3	Survey kelayakan lokasi		Jumlah Pelaksanaan survey terhadap pengajuan rekomendasi perizinan (Kegiatan)	1	35.000.000	Survey kelayakan lokasi		Jumlah Pelaksanaan survey terhadap pengajuan rekomendasi perizinan (Kegiatan)	1	35.000.000	

16	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)	100	50.000.000	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)	100	50.000.000	
1.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang		Jumlah Dokumen Pelaporan pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan (Dokumen)	1	50.000.000	Pengawasan Pemanfaatan Ruang		Jumlah Dokumen Pelaporan pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan (Dokumen)	1	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada daerah atau kawasan terpencil dan kawasan pariwisata hal ini sangat relevan dengan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya pada Pembangunan prasarana Penataan Ruang dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan dari hal di atas maka dapat kita simpulkan beberapa tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana tertera di bawah ini.

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun tujuan OPD dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tingkat kemantapan Infrastruktur Jalan.
2. Tercapainya aksesibilitas antar wilayah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang bermutu.

Meningkatkan integritas penyelenggara pembangunan jalan dan tatalaksana pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

B. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja).

Adapun sasaran OPD dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu.
2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah serta terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi.

- 3. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas Usaha Jasa Konstruksi.
- 4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur penyelenggara pembangunan jalan dan penguatan kelembagaan.

Selanjutnya hubungan Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tersebut selanjutnya dapat disusun dalam Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.5.1. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

Visi : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Iklusif dan Berkarakter”			
Misi : “Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Akseibilitas			
RPJMD		RENSTRA	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan akseibilitas wilayah pelosok dan konektifitas antar wilayah	1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur konektifitas wilayah	1. Tercapainya tingkat kemantapan insfrastruktur jalan. 2. Tercapainya akseibilitas antar wilayah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.	1. Terwujudnya pembangunan insfrastruktur jalan yang bermutu. 2. Meningkatnya akseibilitas antar wilayah serta terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi.
Misi : “Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan.	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar.	1. Terwujudnya penyelenggaraa n jasa konstruksi yang bermutu.	1. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi. 2. Meningkatnya

		2. Meningkatkan integritas penyelenggara pembangunan jalan dan tata laksana pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	kapasitas sumber daya aparatur penyelenggara pembangunan jalan dan penguatan kelembagaan.
--	--	--	---

Berikut dari hasil Penelaahan Renstra Provinsi dan Renstra Daerah maka lahirlah Program atau kegiatan yang dapat kita lihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.5.2. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)		Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)	22.538.000.000	

Untuk kegiatan ini sebagian besar berasal dari dana hibah.

BAB III

3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014-2019, Renstra ini menjadi Pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di daerah dalam menyusun Renstra selama 5 tahun.

Arahan Kebijakan yang termuat dalam Renstra Kementrian Pekerjaan Umum yang selaras dengan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Maju. Pembangunan Prasarana dan Sarana ini diarahkan pada :

1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.
4. Pembangunan prasarana Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) dan pendekatan pengelolaan pasokan

(*supply management*). Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan non konstruksi melalui konservasi Penataan Ruang, keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai dan peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan.

5. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang melalui pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis.
6. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, Penataan Ruang, serta kesehatan.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

1. Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas
2. Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas.

B. Sasaran

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas kemudian dirumuskan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Dnas PU-PTR Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
- Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah.
- Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	BB	A
2	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	59,18	60,16	61,14	62,12	63,10	64,08
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	44,70	45,34	45,98	46,62	47,26	47,26
3	Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)	97,80	100	100	100	100	100
			Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan (%)	30,00	30,25	30,50	30,75	31,00	31,25

3.3. Program dan Kegiatan.

Program merupakan Instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bidang kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Secara garis besar Rencana Strategis Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dituangkan dalam sejumlah Program selama kurun waktu lima tahunan yaitu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang meliputi :

Tabel. 3.3.1. Rekapitulasi Nama Program dan Kegiatan (Tahun 2019 – 2023)

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)
5.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)
6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)
1	Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Unit)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Paket)
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Paket)
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan (Kegiatan)
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)
8	Pengadaan Moubeler	Jumlah Pengadaan Mobeler (Set)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur (%)
1.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah MesinK/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN yang diadakan (Pasang)
3.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus (Non Dinas) untuk ASN dan Tenaga Kontrak yang diadakan (Pasang)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, dan Keuangan(%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal (Orang)
2	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Kegiatan)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)

1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)
Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)
1.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)
2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)
3	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten
		Persentase Pembangunan Jembatan
1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)
2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)
3	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)
4.	Bulan Bakti Nasional	Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)
5.	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)
1	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)
2	Rehabiltiasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)
3	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)
4	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)
5	Pemelihaaraan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dipeliharahan secara rutin oleh 9 UPTD (Km)
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)
1.	Inspeksi Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang disurvei kondisi (Km)
2.	Inspeksi Kondisi Jembatan	Panjang Jembatan Kabupaten yang disurvei kondisi (M)
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan		Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)
1.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Panjang jalan berbasis SIG (Km)
2.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Jumlah Jembatan berbasis SIG (Unit)
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan)
4	Penyusunan Leger Jalan	Panjang jalan yang dilegalisasi (Km)
5	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Jumlah aplikasi sistem informasi jalan dan jembatan (Aplikasi)
Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)

1	Pembangunan Gedung Workshop	Jumlah Gedung yang dibangun (Unit)
2	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Gedung Laboratorium yang dibangun (Unit)
3	Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat berat yang diadakan (Unit)
4	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang diadakan (Set)
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop	Jumlah Gedung workshop yang dipelihara (Unit)
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)
8	Penataan Halaman Gedung Workshop	Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)
9.	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan	JUmlah Data Base Fasilitas Penunjang Jalan (Dok)
10	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)
11	Rehabiltasi/Pemeliharaan PJU Lampu Jalan	Jumlah PJU lampu jalan yang terpelihara oleh UPT (Titik)
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Persentase Pembangunan Infrasturktur Jalan Desa (%)
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)	Panajng Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)
Program Pengaturan Jasa Konstruksi		Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa kosntruksi di Kabupaten Bone (%)
1.	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi (Kegiatan)
2.	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi Ijin Jasa Konstruksi (Rekomendasi)
Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (Kegiatan)
2.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan (Dokumen)
3.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah master plan untuk kawasan industri (Dokumen)
4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)	Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)
5	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupten Bone yang akan direvisi (Dokumen)
Program Pemanfaatan Ruang		Persentase pemanfaatan ruang (%)
1.	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi kelayakan pemanfaatan ruang (Kegiatan)
2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang terbangun (Ha)
3	Survey kelayakan lokasi	Jumlah Pelaksanaan survey terhadap pengajuan rekomendasi perizinan (Kegiatan)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)
1.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaporan pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan (Dokumen)

Tabel. 3.3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100	1.662.950.000			100	1.672.950.000
1	03	01	02	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar		276	185.000.000			276	195.000.000
1	03	01	07	2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)		672	315.000.000			672	315.000.000
1	03	01	13	3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		12	30.000.000			12	30.000.000
1	03	01	15	4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)		1140	140.000.000			1140	140.000.000
1	03	01	23	5.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)		800	722.950.000			800	722.950.000

1	03	01	24	6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)		60	270.000.000			60	270.000.000
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)		100	2.473.000.000			100	622.500.000
1	03	02	05	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Unit)		14	1.500.000.000			-	-
1	03	02	07	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Paket)		3	20.000.000			3	20.000.000
1	03	02	09	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Paket)		5	105.000.000			5	65.000.000
1	03	02	20	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)		1	100.000.000			-	-
1	03	02	22	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)		5	200.000.000			5	200.000.000
1	03	02	24	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)		60	257.500.000			74	265.000.000
1	03	02	28	7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)		21	72.500.000			24	72.500.000
1	03	02	29	8	Pengadaan Moubeler	Jumlah Pengadaan Mobeler (Set)		5	218.000.000			-	-

1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin ASN dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi masing-masing (%)		100	199.650.000			100	-
1	03	03	01	1.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)		2	30.000.000			-	-
1	03	03	02	2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN yang diadakan (Pasang)		65	148.050.000			-	-
1	03	03	05	3.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus (Non Dinas) untuk ASN dan Tenaga Kontrak yang diadakan (Pasang)		120	21.600.000			-	-
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, Keuangan dan Keterampilan khusus Bidang Ke Puan (%)		100	150.000.000			100	65.000.000
1	03	05	01	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal (Orang)		3	100.000.000			1	25.000.000
1	03	05	19	2	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Kegiatan)		27	50.000.000			14	40.000.000
1	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)		100	40.000.000			100	40.000.000

1	03	06	01	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)		3	40.000.000			3	40.000.000
1	03	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)		100	167.500.000			100	187.500.000
1	03	08	01	1.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)		5	70.000.000			6	90.000.000
1	03	08	02	2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)		1	25.000.000			1	25.000.000
1	03	08	03	3	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)		2	72.500.000			2	72.500.000
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten		28,09	52.500.000.000			30,34	72.500.000.000
						Persentase Pembangunan Jembatan		32,45	4.000.000.000			33,17	5.000.000.000
1	03	15	03	1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)		25	50.000.000.000			35	70.000.000.000
1	03	15	04	2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)		3	1.000.000.000			3	1.000.000.000

1	03	15	05	3	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)		30	3.000.000.000			30	4.000.000.000
1	03	15	07	4.	Bulan Bakti Nasional	Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)		1	1.500.000.000			1	1.500.000.000
1	03	15	11	5.	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)		10	1.000.000.000			10	1.000.000.000
1	03	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)		71,16	41.900.000.000			79,36	41.900.000.000
1	03	18	01	1	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)		5	500.000.000			5	500.000.000
1	03	18	03	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)		15	36.000.000.000			15	36.000.000.000
1	03	18	06	3	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)		-	-			-	-
1	03	18	15	4	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)		-	-			-	-
1	03	18	18	5	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin oleh 9 UPTD (Km)		108	5.400.000.000			108	5.400.000.000

1	03	20		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)		100	250.000.000			100	250.000.000
1	03	20	01	1.	Inspeksi Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang disurvei kondisi (Km)		1559,514	150.000.000			1559,514	150.000.000
1	03	20	02	2.	Inspeksi Kondisi Jembatan	Panjang Jembatan Kabupaten yang disurvei kondisi (M)		4836,9	100.000.000			4836,9	100.000.000
1	03	22		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan		Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)		-	440.000.000			100	1.090.000.000
1	03	22	01	1.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Panjang jalan berbasis SIG (Km)		-	-			922,14	500.000.000
1	03	22	02	2.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Jumlah Jembatan berbasis SIG (Unit)		-	-			247	150.000.000
1	03	22	03	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan)		12	200.000.000			12	200.000.000
1	03	22	05	4	Penyusunan Leger Jalan	Panjang jalan yang dilegalisasi (Km)		1	200.000.000			1	200.000.000

1	03	22	06	5	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Jumlah aplikasi sistem informasi jalan dan jembatan (Aplikasi)		1	40.000.000			1	40.000.000
1	03	23		Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)		100	3.175.000.000			100	4.225.000.000
1	03	23	02	1	Pembangunan Gedung Workshop	Jumlah Gedung yang dibangun (Unit)		-	-			1	500.000.000
1	03	23	03	2	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Gedung Laboratorium yang dibangun (Unit)		1	500.000.000			-	-
1	03	23	04	3	Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat berat yang diadakan (Unit)		1	1.500.000.000			1	2.500.000.000
1	03	23	06	4	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang diadakan (Set)		1	200.000.000			-	-
1	03	23	08	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop	Jumlah Gedung workshop yang dipelihara (Unit)		-	-			1	200.000.000
1	03	23	11	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)		12	500.000.000			12	500.000.000

1	03	23	12	7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)	-	-			3	50.000.000
1	03	23	14	8	Penataan Halaman Gedung Workshop	Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)	-	-			-	-
1	03	23	15	9.	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan	JUmlah Data Base Fasilitas Penunjang Jalan (Dok)	-	-			-	-
1	03	23	16	10	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)	1	100.000.000			1	100.000.000
1	03	23	17	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan PJU Lampu Jalan	Jumlah PJU lampu jalan yang terpelihara oleh UPT (Titik)	75	375.000.000			75	375.000.000
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Persentase Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (%)	50,95	4.000.000.000			52,04	4.000.000.000
1	03	30	02	1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)	Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)	10	4.000.000.000			10	4.000.000.000

1	03	32		Program Pengaturan Jasa Konstruksi		Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa kosntruksi di Kabupaten Bone (%)		100	150.000.000			100	150.000.000
1	03	32	01	1.	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi (Kegiatan)		2	125.000.000			2	125.000.000
1	03	32	02	2.	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi Ijin Jasa Konstruksi (Rekomendasi)		100	25.000.000			100	25.000.000
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)		100	1.230.000.000			100	730.000.000
1	05	15	03	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (Kegiatan)		3	130.000.000			3	130.000.000
1	05	15	06	2.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan (Dokumen)		1	500.000.000			1	500.000.000
1	05	15	07	3.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah master plan untuk kawasan industri (Dokumen)		1	500.000.000			-	-
1	05	15	10	4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)	Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)		4	100.000.000			4	100.000.000

1	05	15	11	5	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupten Bone yang akan direvisi (Dokumen)		-	-			-	-
1	05	16		Program Pemanfaatan Ruang		Persentase pemanfaatan ruang (%)		1	260.000.000			1	260.000.000
1	05	16	01	1.	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi kelayakan pemanfaatan ruang (Kegiatan)		1	25.000.000			1	25.000.000
1	05	16	10	2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang terbangun (Ha)		10	200.000.000			10	200.000.000
1	05	16	11	3	Survey kelayakan lokasi	Jumlah Pelaksanaan survey terhadap pengajuan rekomendasi perizinan (Kegiatan)		1	35.000.000			1	35.000.000
1	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)		100	50.000.000			100	50.000.000
1	05	17	05	1.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaporan pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan (Dokumen)		1	50.000.000			1	50.000.000

BAB IV

4 *Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah*

4.1. Rencana Kerja

Program merupakan Instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bidang kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Secara garis besar Rencana Strategis Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dituangkan dalam sejumlah Program selama kurun waktu lima tahunan yaitu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 4.2 Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Bone.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			Target	Rp.(000)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	92,6	100	1.651.748	100	1.662.950	100	1.672.950	100	1.677.950	100	1.652.950	100	8.318.548	PU-PTR		
			1	03	01	02	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar	276	276	175.000	276	185.000	276	195.000	276	200.000	276	175.000	1380	930.000	PU-PTR	
			1	03	01	07	2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	56	672	313.910	672	315.000	672	315.000	672	315.000	672	315.000	3360	1.573.910	PU-PTR	
			1	03	01	13	3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	12	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	60	150.000	PU-PTR	

			1	03	01	15	4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	1104	1104	140.000	1140	140.000	1140	140.000	1140	140.000	5664	700.000	PU-PTR		
			1	03	01	23	5.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)	601	800	722.950	800	722.950	800	722.950	800	722.950	4000	3.614.750	PU-PTR		
			1	03	01	24	6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	60	60	269.888	60	270.000	60	270.000	60	270.000	300	1.349.888	PU-PTR		
			1	03	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)	75	100	629.117	100	2.473.000	100	622.500	100	707.500	100	592.500	100	5.024.617	PU-PTR
			1	03	02	05	1	Pengadaan Kendaran Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Unit)	19	-	-	14	1.500.000	-	-	-	-	14	1.500.000	PU-PTR		
			1	03	02	07	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Paket)	-	-	-	3	20.000	3	20.000	3	20.000	3	85.000	12	145.000	PU-PTR
			1	03	02	09	3	Pengadaan	Jumlah	5	5	101.500	5	105.000	5	65.000	5	50.000	5	85.000	25	406.500	PU-

						Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor (Paket)															PTR		
			1	03	02	20	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)	1	-	-	1	100.000	-	-	1	100.000	-	-	2	200.000	PU-PTR	
			1	03	02	22	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan (Kegiatan)	5	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	85.000	25	885.000	PU-PTR	
			1	03	02	24	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)	60	60	257.500	60	257.500	74	265.000	74	265.000	74	265.000	342	1.310.000	PU-PTR	
			1	03	02	28	7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)	18	18	70.117	21	72.500	24	72.500	24	72.500	30	72.500	117	360.117	PU-PTR	
			1	03	02	29	8	Pengadaan Moubeler	Jumlah Pengadaan Mobeler (Set)	5	-	-	5	218.000	-	-	-	-	-	-	5	218.000	PU-PTR	
			1	03	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	CakupanRealisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur (%)	91,8	-	-	100	199.650	-	-	100	30.000	100	169.650	100	399.300	PU-PTR	
			1	03	03	01	1.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah MesinK/Kartu Absensi yang	1	-	-	2	30.000	-	-	2	30.000	-	-	4	60.000	PU-PTR	

							diadakan (Unit)																

								Bimbingan Teknis (Kegiatan)															
			1	03	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	15.405	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	175.405	PU-PTR
			1	03	06	01	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	2	3	15.405	3	40.000	3	40.000	3	40.000	3	40.000	15	175.405	PU-PTR
			1	03	08			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	-	100	160.930	100	167.500	100	187.500	100	167.500	100	187.500	100	870.930	PU-PTR
			1	03	08	01	1.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	88.430	5	70.000	6	90.000	5	70.000	5	90.000	27	408.430	PU-PTR

			1	03	08	02	2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)	-	0	0	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	4	100.000	PU-PTR	
			1	03	08	03	3	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)	-	2	72.500	2	72.500	2	72.500	2	72.500	2	72.500	10	362.500	PU-PTR	
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Dan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten	25,21	26,17	32.500.000	28,09	52.500.000	30,34	72.500.000	32,58	72.500.000	34,83	72.500.000	34,83	302.500.000	PU-PTR		
								Persentase Pembangunan Jembatan	31,31	31,83	3.000.000	32,45	4.000.000	33,17	5.000.000	33,9	4.500.000	34,62	4.500.000	34,62	21.000.000	PU-PTR		
			1	03	15	03	1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)	368,57	15	30.000	25	50.000	35	70.000	35	70.000	35	70.000	145	290.000	PU-PTR	
			1	03	15	04	2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)	12	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	15	5.000.000	PU-PTR	
			1	03	15	05	3	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)	1514,7	35	2.000.000	30	3.000.000	30	4.000.000	35	3.500.000	35	3.500.000	165	16.000.000	PU-PTR	

			1	03	15	07	4.	Bulan Bakti Nasional	Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)	4	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5	7.500.000	PU-PTR	
			1	03	15	11	5.	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)	10	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	50	5.000.000	PU-PTR	
			1	03	18			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)	62,84	62,95	13.881.820	71,16	41.900.000	79,36	41.900.000	87,57	41.900.000	95,78	41.900.000	95,78	181.481.820	PU-PTR	
			1	03	18	01	1	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)	35	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	25	2.500.000	PU-PTR	
			1	03	18	03	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	686,27	5,574	10.033.200	15	36.000.000	15	36.000.000	15	36.000.000	15	36.000.000	65,574	154.033.200	PU-PTR	
			1	03	18	06	3	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)	-	40	1.498.620	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.498.620		
			1	03	18	15	4	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)	233	100	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	500.000		
			1	03	18	18	5	Pemeliharaan Rutin	Panjang Jalan yang	-	27	1.350.000	108	5.400.000	108	5.400.000	108	5.400.000	108	5.400.000	459	22.950.000	UPT	

						Jalan dan Jembatan	dipelihara secara rutin oleh 9 UPTD (Km)															
1	03	20				Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)	100	-	-	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	1.000.000	PU-PTR	
1	03	20	01	1.		Inspeksi Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang disurvei kondisi (Km)	1559,51	1559,51	-	1559,51	150.000	1559,51	150.000	1559,51	150.000	1559,51	150.000	7797,57	600.000	PU-PTR	
1	03	20	02	2.		Inspeksi Kondisi Jembatan	Panjang Jembatan Kabupaten yang disurvei kondisi (M)	4836,9	4836,9	-	4836,9	100.000	4836,9	100.000	4836,9	100.000	4836,9	100.000	24184,5	400.000	PU-PTR	
1	03	22				Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)	62,8	-	-	100	440.000	100	1.090.000	100	440.000	100	440.000	100	2.410.000	PU-PTR	
1	03	22	01	1.		Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Panjang jalan berbasis SIG (Km)	1559,51	-	-	-	-	922,14	500.000	-	-	-	-	922,14	500.000	PU-PTR	
1	03	22	02	2.		Penyusunan Sistem Informasi/D	Jumlah Jembatan berbasis SIG	-	-	-	-	-	247	150.000	-	-	-	-	247	150.000	PU-PTR	

						ata Base Jembatan	(Unit)																	
			1	03	22	03	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan)	12	-	-	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	48	800.000	PU-PTR	
			1	03	22	05	4	Penyusunan Leger Jalan	Panjang jalan yang dilegalisasi (Km)	-	-	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	4	800.000	PU-PTR	
			1	03	22	06	5	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Jumlah aplikasi sistem informasi jalan dan jembatan (Aplikasi)	-	-	-	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	4	160.000	PU-PTR	
			1	03	23			Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	80	90	6.195.700	100	3.175.000	100	4.225.000	100	1.500.000	100	1.225.000	100	16.320.700	PU-PTR	
			1	03	23	02	1	Pembangunan Gedung Workshop	Jumlah Gedung yang dibangun (Unit)	1	-	-	-	-	1	500.000	-	-	-	-	1	500.000	PU-PTR	
			1	03	23	03	2	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Gedung Laboratorium yang dibangun (Unit)	-	-	-	1	500.000	-	-	-	-	-	-	1	500.000	PU-PTR	
			1	03	23	04	3	Pengadaan Alat-Alat	Jumlah Alat berat yang	9	3	5.000.000	1	1.500.000	1	2.500.000	-	-	-	-	5	9.000.000	PU-PTR	

						Berat	diadakan (Unit)																	
			1	03	23	06	4	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang diadakan (Set)	1	-	-	1	200.000	-	-	-	-	-	-	1	200.000	PU-PTR	
			1	03	23	08	5	Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung Workshop	Jumlah Gedung workshop yang dipelihara (Unit)	1	-	-	-	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	3	600.000	PU-PTR	
			1	03	23	11	6	Rehabilitasi /Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)	12	12	345.700	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	60	2.345.700	PU-PTR	
			1	03	23	12	7	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)	-	1	150.000	-	-	3	50.000	-	-	3	50.000	7	250.000	PU-PTR	
			1	03	23	14	8	Penataan Halaman Gedung Workshop	Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)	1	1	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000	PU-PTR	

			1	03	23	15	9.	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan	JUmlah Data Base Fasilitas Penunjang Jalan (Dok)	0 Km	1	200.000	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000	PU-PTR		
			1	03	23	16	10	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	PU-PTR	
			1	03	23	17	11	Rehabilitasi /Pemeliharaan PJU Lampu Jalan	Jumlah PJU lampu jalan yang terpelihara oleh UPT (Titik)	-	40	200.000	75	375.000	75	375.000	75	700.000	75	375.000	340	2.025.000	UPT	
			1	03	30			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (%)	48,79	49,87	6.538.000	50,95	4.000.000	52,04	4.000.000	53,12	4.000.000	54,2	4.000.000	54,2	22.538.000	PU-PTR	
			1	03	30	02	1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)	449,87	10	6.538.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	50	22.538.000	PU-PTR	

							(Infrastruktur)	yang ditangani (Km)																
			1	03	32		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa kosntruksi di Kabupaten Bone (%)	100	100	125.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	725.000	PU-PTR		
			1	03	32	01	1.	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi (Kegiatan)	1	2	125.000	2	125.000	2	125.000	2	125.000	2	125.000	10	625.000	PU-PTR	
			1	03	32	02	2.	Pengaturan dan Penyeleng garaan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi Ijin Jasa Konstruksi (Rekomenda si)	116	100	-	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	500	100.000	PU-PTR	

Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Tata Ruang dan Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan	1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)	100	100	927.150	100	1.230.000	100	730.000	100	730.000	100	1.230.000	100	4.847.150	PU-PTR	
			1	05	15	03	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	3	3	128.575	3	130.000	3	130.000	3	130.000	3	130.000	15	648.575	PU-PTR	
			1	05	15	06	2.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan (Dokumen)	4	2	-	1	500.000.	1	500.000	1	500.000	1	500.000	6	2.000.000	PU-PTR	
			1	05	15	07	3.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah master plan untuk kawasan industri (Dokumen)	-	-	-	1	500.00	-	-	-	-	1	500.000	2	1.000.000	PU-PTR	
			1	05	15	10	4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)	Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	4	4	98.575	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	20	498.575	PU-PTR	
			1	05	15	11	5	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupaten Bone yang akan direvisi	1	1	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	700.000	PU-PTR	

								(Dokumen)																
			1	05	16			Program Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang (%)	100	100	260.000	100	260.000	100	260.000	100	260.000	100	1.300.000	PU-PTR			
			1	05	16	01	1.	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi kelayakan pemanfaatan ruang (Kegiatan)	-	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	5	125.000	PU-PTR	
			1	05	16	10	2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang terbangun (Ha)	23,06	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	50	1.000.000	PU-PTR	
			1	05	16	11	3	Survey kelayakan lokasi	Jumlah Pelaksanaan survey terhadap pengajuan rekomendasi perizinan (Kegiatan)	-	1	35.000	1	35.000	1	35.000	1	35.000	1	35.000	5	175.000	PU-PTR	
			1	05	17			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	250.000	PU-PTR	
			1	05	17	05	1.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaporan pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan (Dokumen)	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	5	250.000	PU-PTR	

BAB V

5 *P*enutup

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sebagai rencana jangka pendek dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) 2013 – 2018, Visi dan Misi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam Rencana Kerja ini tertuang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Watampone, 2019
**KEPALA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN
 RUANG KABUPATEN BONE**



H. ASKAR, S. ST, M.Si
 Pangkat : Pembina, IV/a
 Nip. 19681231 199803 1 042



EN BONE

www.pu.bone.go.id

Jalan Laksamana Yos Sudarso - Watampone, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan
Telpon : (0481) 26907 - Email : pu@bone.go.id